

Transformasi Islam Moderat Mohammad Natsir Dalam Bernegara

Sugianto

Institut Agama Islam An-Nur Lampung
Sugiantoalfaruqi3@gmail.com

Umi Aisyah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
umiaisyah@radenintan.ac.id

Esen Pramudya Utama

Institut Agama Islam An-Nur Lampung
pramudyautama863@gmail.com

Rahmat Hidayat

Institut Agama Islam An-Nur Lampung
hidayatrahmat677@gmail.com

Abstract. *This article aims to reveal the transformation of moderate Islam by Mohammad Natsir in the state. Where Natsir who lives not only as a statesman, but also in Islam is a Muslim thinker and scholar. Movements and upheavals of thought whose source is Islam, makin Natsir a militant fighter and statesmen in the fiht for Islam and the state. The primary sources in this study are: 1) M. Natsir, Fiqhud Da'wah, cet. Ke-10, (Jakarta: Capita Selecta,1996), 2). M. Natsir, Capita Selecta I-III (Bandung: Sumur Bandung, 1961), dan 3), M. Natsir, Islam dan akal merdeka, (Bandung: Segs Arsy, 2015), 4). M. Natsir, Islam sebagai Dasar Negara, (Bandung: Segs Arsy, 2014), dan 5) M. Natsir, Revolusi Indonesia,*

(Bandung: Sega Arsy, 2016). Next, the data were analyzed using the method content analysis and critical discourse analysis. The result showed that the transformation of moderate Islam by Mohammad Natsir was reflected in Natsir's political style, where Natsir combines the concept of state with religion, Islam as the core in politics. So it can be concluded that Natsir's transformation of moderate Islam in the state uses the concept of an Islamic democracy state.

Abstrak

*Artikel ini bertujuan untuk mengungkap transformasi Islam moderat Mohammad Natsir dalam bernegara. Dimana Natsir yang hidup bukan hanya sebagai negarawan semata, namun ia juga dalam Islam adalah sebagai pemikir dan cendekiawan Muslim. Pergerakan dan pergolakan pemikiran yang sumbernya dari Islam, menjadikan Natsir sebagai pejuang dan negarawan yang militan di dalam memperjuangkan Islam dan Negara. Sumber primer dalam penelitian ini adalah: 1) M. Natsir, *Fiqih Da'wah*, cet. Ke-10, (Jakarta: Capita Selecta, 1996), 2) M. Natsir, *Capita Selecta I-III* (Bandung: Sumur Bandung, 1961), dan 3) M. Natsir, *Islam dan akal merdeka*, (Bandung: Sega Arsy, 2015), 4) M. Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, (Bandung: Sega Arsy, 2014), dan 5) M. Natsir, *Revolusi Indonesia*, (Bandung: Sega Arsy, 2016). Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan metode analisa isi (content analysis) dan analisis diskursus kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi Islam moderat Mohammad Natsir tercermin pada gaya berpolitik yang dilakukan oleh Natsir, dimana Natsir memadukan antara konsep bernegara dengan agama, Islam sebagai inti dalam berpolitik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transformasi Islam moderat Natsir dalam bernegara menggunakan konsep Negara demokrasi Islam.*

Keywords: *Islam Moderat, Negara dan Politik*

A. Pendahuluan

Rekayasa intelektual dan transmisi suatu ajaran yang diambil dari sumber utama umat Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadist, pada dasarnya merupakan dialektika terhadap perubahan sosial-kultural yang meliputinya dalam kehidupan masyarakat muslim sepanjang perjalanan sejarahnya¹. Perubahan sosial-kultural merupakan faktor penting terjadinya rekonstruksi sebuah pemikiran, sebagaimana yang pernah dialami oleh imam syafi'i sehingga lahir *qoul jadidnya*. Sebegitu sentralnya peran sosio-kultural sehingga muncul sebuah teori *al-'a>datu muhkamatu*² dan³.

Perdebatan interpretasi teks dan konteks dalam memahami sumber *naqli* dan *aqli* menimbulkan ekspresi yang beragam dalam beragama, diantaranya muncul: Islam Radikal⁴, Islam tradisional⁵, Islam moderat⁶, Islam fundamentalis⁷, Islam sunni dan Islam syiah⁸. Jika ekspresi tersebut dirujuk pada hadis Nabi, maka merupakan suatu sunnatullah, di mana Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan kemudian kita semuanya sebagai yang beriman wajib menjadikan persatuan dengan konsepsi muamalah dengan bentuk internalisasi hubungan antara sesama manusia⁹.

Untuk mewujudkan kehidupan yang toleran dalam bernegara maka perlu kesepakatan bersama yang dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Konsep Islam moderat menjadi solusi dalam bernegara di Indonesia, yang mempunyai masyarakat majemuk dan plural. Ahmad iffan, dkk telah berkesimpulan bahwa moderasi

¹ Mattulada, 1982, 56

² Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, 2007, 69-74

³ Jalaluddin al-Suyuthi, *Husn al-Muhadharah* (Mesir: Dar Ihya Kutub al-Arabiyyah, 1967).

⁴ Anzar Abdullah, "Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis," *Addin* 10, no. 1 (2016): 1.

⁵ Azyumardi Azra, "NU: Islam Tradisional dan Modernitas di Indonesia," *Studia Islamika* 4, no. 4 (2014).

⁶ Abdullah Aly, "Studi Deskriptif Tentang Nilai-Nilai Multikultural Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam," *Jurnal Ilmiah Pesantren* 1, no. 1 (2015): 9-24, <http://jurnal.assalaam.or.id/index.php/dfg/article/view/25/17>.

⁷ Azra, "NU: Islam Tradisional dan Modernitas di Indonesia."

⁸ Muh. Shohibul Itmam, "Pemikiran Islam dalam Perspektif Sunni dan Syi'ah," *Penelitian* 7, no. 2 (2013): 1-18.

⁹ R Hidayat, 2020

beragam dapat dibentuk melalui pendidikan moderasi siyasah, moderasi fiqh, dan moderasi ibadah sebagai pijakan dalam kemoderatan¹⁰. Sedangkan Benny Afwadzi berkesimpulan bahwa pembentukan moderasi beragama dapat dilakukan melalui *parenting* yang bernuansa *wasathiyah* di lingkungan anak sedini mungkin¹¹. Mengadakan prosesi penyuluhan sebagai bentuk pendistribusian pemahaman kepada halayak yang dijadikan partner di dalam kegiatan¹².

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini membahas Islam moderat dari sudut politik yang dilakukan oleh Mohammad Natsir. Penelitian tentang pemikiran Natsir banyak yang telah melakukannya, di antaranya: saoki berkesimpulan bahwa pemikiran natsir tentang relasi Islam dan Negara merupakan respon terhadap pemikiran sekuler dalam bernegara¹³. Berbeda dengan penelitiannya muridan, gagasan Natsir mencoba mengintegrasikan antara agama dan Negara menjadi sebuah ekspresi bernegara yang santun¹⁴.

Adapun yang menjadi objek formal dalam penelitian ini adalah pemikiran Mohammad Natsir tentang gagasan islam moderat. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dalam bentuk penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan¹⁵. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah: 1) M. Natsir, *Fiqhud Da'wah*, cet. Ke-10, (Jakarta: Capita Selecta, 1996), 2). M. Natsir, *Capita Selecta I-III* (Bandung: Sumur Bandung, 1961), dan 3), M. Natsir, *Islam dan akal merdeka*, (Bandung: Sega Arsy, 2015), 4). M. Natsir, *Islam*

¹⁰ Ahmad Iffan dan M Ridho Nur, "Ahmad Iffan" 3, no. 2 (2020).

¹¹ Benny Afwadzi et al., "Membangun Moderasi Beragama Dengan Parenting Wasathiyah Dan Pendahuluan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 16, no. 2 (2020): 106-120.

¹² Rahmat Hidayat, "Konsep Pendidikan Karakter Dalam Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Pemikiran Burhanuddin Al-Zarnuji)," *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019): 1.

¹³ Saoki Saoki, "Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid," *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2015): 344-367.

¹⁴ Muridan, "gagasan pemikiran dan gerakan dakwah m. natsir di indonesia," *komunika* 4, no. dakwah dan komunikasi (2010), media.neliti.com/media/publications/148979-ID-gagasan-pemikiran-dan-gerakan-dakwah-m-n.pdf.

¹⁵ Kartini Kartono, *pengantar metodologi research sosial* (Bandung: Alumni bandung UI, 1980).

sebagai Dasar Negara, (Bandung: Segarsy, 2014), dan 5) M. Natsir, *Revolusi Indonesia*, (Bandung: Segarsy, 2016). Penulis menjadikan buku tersebut sebagai sumber primer dikarenakan buku tersebut banyak membahas tentang pemikiran Muhammad Natsir, terutama tentang konsep Islam moderat, sehingga penulis menjadikannya sebagai sumber primer. Sumber primer ini ditopang dengan sumber sekunder, adapun sumber sekunder yang penulis gunakan adalah buku yang berkaitan dengan pemikiran Natsir, baik yang ditulis oleh Natsir langsung atau oleh penulis lain.

Selanjutnya data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka, yaitu membaca dan memahami referensi penelitian¹⁶. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)¹⁷. Selain menggunakan metode analisis isi, peneliti juga menggunakan analisis diskursus kritis. Hal ini sebagaimana pendapat Marianne Jorgensen dan Louise Phillips, bahwa konstruksionisme sosial dibangun atas beberapa premis, yakni 1) Pendekatan kritis terhadap pengetahuan yang *taken for granted*; 2) Spesifikasi kultural dan historis; 3) Hubungan antara pengetahuan dan proses sosial; 4) Hubungan antara pengetahuan dan tindakan sosial¹⁸. Kelima karakter tersebut yakni: karakter dari proses-proses dan struktur-struktur kultural dan sosial sebagian bersifat linguistik-diskursif. Karakter ini menegaskan bahwa dunia sosial yang di dalamnya terdapat berbagai proses dan struktur sosial, diproduksi melalui praktik-praktik linguistik-diskursif. Melalui produksi dan konsumsi teks, praktik-praktik diskursif bisa merealisasikan reproduksi dan transformasi sosial dan kultural. Oleh karenanya, CDA berpretensi untuk menjelaskan dimensi linguistik diskursif dari berbagai fenomena sosial yang mencakup proses dan struktur sosial dan kulturalnya.

¹⁶ Wahyu Widodo, "Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kemampuan Kerja Pegawai (Studi di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur)," *Jurnal TAPIS* 11, no. 2 (2015): 134–142.

¹⁷ Noeng Muhajir, *Metode penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996).

¹⁸ Marianne Jorgensen dan Louise Phillips, *Discourse Analysis as Theory and Method* (Los Angeles: Sage, 2002).

B. Hasil dan Pembahasan

1. Genelogi Natsir

Ada suatu kepercayaan bahwa segala yang terjadi di atas dunia ini merupakan kaitan antara sebab dan akibatnya. Bila ada hal yang terjadi maka orang akan mencari apa penyebabnya, atau sebaliknya kalau ada sesuatu yang dilakukan maka orang pun akan memperkirakan apa akibatnya kelak. Begitu pula dalam kehidupan seseorang, apalagi orang yang terkenal, akan diketemukan hubungan antara masa mudanya yang melatar-belakangi pemikiran dan aktivitasnya pada masa dewasanya.

Begitu pula dengan Natsir, sebagai seorang yang pernah berkiprah di dunia politik dalam kurun waktu yang cukup panjang, ia pun mempunyai sesuatu yang melatar-belakangi dan menjadi landasan bagi pemikiran dan aktivitas politiknya. Tidak saja dalam bidang politik, bahkan juga dalam semua bidang pemikiran dan aktivitas kehidupannya. Menurut kajian penulis, ada dua hal yang menjadi latar belakang pemikiran dan aktivitas Natsir itu, yakni guru-gurunya, serta polemik masalah keagamaan dan kebangsaan.

Merupakan hal yang wajar apabila hubungan yang baik dengan sang guru memberikan bekas yang mendalam pada diri si murid. Murid itu akan selalu mengingat pendidikan dan pengajaran gurunya, termasuk sikap dan perilaku kehidupannya akan senantiasa dikenang. Oleh karena itu, tak sedikit murid yang terkesan kepada gurunya akan termotivasi, bahkan terpengaruh, dalam pemikiran dan aktivitas kehidupannya pada masa-masa kemudian. Demikian pula Natsir, ada beberapa orang guru yang memberikan motivasi mendalam pada dirinya, sehingga dapat dikatakan “mempengaruhi” pemikiran dan aktivitasnya dalam berbagai aspek, termasuk dalam masalah politik. Hal itu tampak dalam pemikiran Natsir yang terlihat pada tulisan-tulisan dan ceramah-ceramahnya, juga pada sikap dan perilaku kehidupannya, terutama dalam pemikiran dan aktivitas politik yang menjadi kajian ini.

Menurut pengakuan Natsir sendiri, ada tiga orang guru yang mempengaruhi alam pikirannya, yaitu Ahmad Hassan (pemimpin Persatuan Islam), Haji Agus Salim, dan Syekh Ahmad Syurkati (pendiri Al Irsyad)¹⁹. Ada yang menilai bahwa Natsir dipengaruhi

¹⁹ Memoar, *Senarai Kiprah Sejarah*, II. (Jakarta Indonesia: Pustaka Utama Grafiti, 1993).

pula oleh HOS Tjokroaminoto (pemimpin Sarekat Islam)²⁰. Dari keempat tokoh Islam itu, dua orang tampaknya paling mempengaruhi pemikiran, sikap hidup, dan aktivitas politik Natsir, yakni Ahmad Hassan dan Haji Agus Salim.

a. Ahmad Hassan (1887–1958)

Natsir berkenalan dengan Hassan ketika dia menjadi siswa AMS di Bandung pada tahun 1927. Tatkala itu, Natsir bersama Fakhruddin Al-Kahiri, Rusbandi, Indracahya, dan lain-lain mengikuti kursus keagamaan dalam bentuk kelompok diskusi yang dibimbing oleh Hassan²¹. Intensitas perjumpaan Natsir dengan Hasan selalu nampak jelas di berbagai tempat selalu memberikan ruang berkomunikasi yang erat. Kondisi yang dijelaskan oleh Natsir dengan ekspektasi waktu yang tak tentu. Namun dalam kondisi ini, Hasan selalu menerimanya dengan tangan terbuka dan memberikan tanggapan dan reaksi yang berbalik dalam diskusi tersebut. Inilah perlakuan Hasan terhadap Natsir dikala kesibukannya ia tetap melayani dan mengajak Natsir berkomunikasi sangat intim terkait segala macam pembahasan.

Berbagai persoalan yang dibahas dengan hangat terkait dengan permasalahan seputar agama, politik, dan intensitas pergerakan perjuangan di dalam kemerdekaan. Perkara ini membuat Natsir semakin berupaya mempertajam dan mendalami kembali pengamalan dan pemahamannya dalam hal agama ketika menemai ilmu di Solok. Sehingga upaya ketekunan Natsir yang diperhatikan Hasan sehingga beberapa karangan Hasan diberikan kepada Natsir, seperti *tafsir al-furqan* dan *tafsir the holy qur'an*²².

Natsir mendapatkan banyak faedah dari pergaulannya dengan Hassan. Tertarik benar hatinya kepada Hassan itu: Kesederhanaan, kerapian kerja, kemandirian, ketawadu'an, kealiman, ketajaman dalam bertukar pikiran, juga keberanian dalam mengemukakan pendapat dan pendiriannya. Mengenai gurunya itu, Natsir menyatakan kesan:

²⁰ Abu Rauzan, "Korban Penulisan Sejarah," *Suara Masjid* (-, Februari 1993).

²¹ A Syafiq Mughni, *Hasan Bandung: Pemikiran Islam Radikal* (Surabaya: Bina Ilmu, 1994).

²² Yusuf Abdullah Puar, *Muhammad Natsir 70 Tahun; Kenang-Kenangan Kehidupannya dan Perjuangan* (Jakarta Indonesia: Pustaka Antara, 1978).

“...beliau (Hassan) tidak mau menyuapkan makanan kepada kader-kadernya. Kalau beliau sudah menyetujui sesuatu, maka hendaklah kita pandai-pandai sendiri menyelesaikannya. Beliau mendidik kadernya berani bertanggung jawab dan sanggup berjuang menghadapi masalah, walaupun bagaimana rumitnya. Kami pemuda-pemuda yang berada di dekatnya selalu diteliti dengan kuat, disiplin dengan ketat, dan diberi tanggung jawab masing-masing. Saya diberi tugas tertentu, demikian pula Fakhruddin Al-Kahiri, Qamaruddin Saleh, Isa Anshary, dan lain-lain”²³.

Saat itu, Natsir merasa mendapat didikan dari seorang guru, yang bukan hanya sebagai guru agama saja, melainkan sekaligus seorang pendidik yang membina pribadi anak didiknya. Mengenang kembali gurunya itu, Natsir menjelaskan salah satu ajaran Ustadz Hassan:

“....Kalau kita sedang berjalan, lalu bertemu dengan dua cabang jalan, ke kiri dan yang ke kanan, maka orang yang dinamakan pemimpin adalah yang berani mengambil resiko untuk memilih salah satu dari dua jalan itu. Kalau dia tidak berani, hanya diam saja, menunggu-nunggu, maka dia bukan pemimpin. Dia pengikut. Tetapi yang mampu mengambil keputusan untuk memilih salah satu di antara dua atau lebih alternatif tadi, dengan ijtihad sekuat mungkin, itulah yang dinamakan pemimpin. Kalau ternyata salah, ya diperbaiki. Jangan sampai disertai nafsu, lalu merasa malu untuk mengakui kesalahan. Kita ini manusia. Imam Syafi'i saja mengakui dan mengoreksi fatwa-fatwanya yang lama bila belakangan ternyata keliru. Itulah antara lain yang diajarkan Tuan Hassan dengan cara dialog”²⁴.

Kepribadian dan cara mendidik Hassan yang demikian itu memberikan kesan yang sangat mendalam pada diri Natsir. Kesan Natsir yang mendalam terhadap sikap dan kepribadian gurunya itu, dia terapkan dalam kehidupannya dan ketika membina kader-

²³ Syafiq A Mughni, *Warisan A. Hassan dalam Arus Pemikiran di Indonesia* (Jakarta Indonesia: Media Dakwah, 1988).

²⁴ Muhammad Lukman Fatahullah Rais, *Mohammad Natsir Pemandu Umat* (Jakarta Indonesia: Bulan Bintang, 1988).

kadernya. Dari Hassan, Natsir belajar menulis dan berargumentasi²⁵. Hassan, yang menurut Dawam Rahardjo, beraliran rasional puritan dengan semboyannya “ijtihad serta keharusan kembali kepada Alqur'an dan hadits”²⁶, telah mewariskan pemikiran keislaman radikal kepada Natsir, dengan titik berangkat yang ketat terhadap keharusan upaya penerapan Al-qur'an dan al-sunnah. Hal itu dapat dilihat apabila diperhatikan tulisan-tulisan Natsir secara mendalam. Sikap yang sedemikian itu, dapat pula dilihat dalam prilaku politik Natsir, baik ketika masih aktif di pemerintahan maupun sebagai warga negara biasa.

b. Haji Agus Salim (1884 – 1954)

Tak ubahnya A. Hassan, begitulah Natsir mencari berbagai literasi keilmuan yang dalam dari berbagai guru. Sampailah jua kepada Haji Agus Salim yang merupakan seorang Ulama, aktivis, pemikir dan pergerakan. Disini Natsir mendapatkan gemblengan terkait dengan aktivitas politik. Konsepsi pergerakan dan pemikiran Natsir terkait dengan politik pada perbincangan dan komunikasinya dengan Agus Salim semasa berdapa dalam satu wadah di AMS dan organisasi *Jong Islamieten Bond (JIB)*. Ketika ditanya tentang kesan dan cara mendidik Agus Salim, Natsir menjelaskan:

“...Dia merakyat dan dekat di hati anak-anak muda. Selain dari itu, caranya mendidik generasi muda cukup unik. Agus Salim memang sangat piawai. Kalau sudah menguraikan atau menganalisa keadaan, kami terkagum-kagum dibuatnya. Kalau ada suatu persoalan, beliau mampu menganalisa dari berbagai sudut pandang yang menakjubkan. Tetapi beliau sama sekali tidak pernah mengunyahkan bagaimana jalan keluar bila ada suatu masalah. Jalan keluarnya diserahkan sepenuhnya kepada kami yang masih muda-muda itu..... Dengan cara seperti itu, Agus Salim mendidik generasi muda untuk kreatif, percaya diri, bertanggung jawab, dan berani mengambil keputusan sesudah ijtihad dan bermusyawarah. Beliau tidak mau ‘menyuapi’ generasi muda, tetapi

²⁵ Lukman Hakiem, *Pemimpin Pulang; Rekaman Peristiwa Wafatnya M. Natsir* (Jakarta Indonesia: Yayasan Piranti Ilmu, 1993).

²⁶ Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1993).

menjadikannya berani mengambil resiko dan tanggung jawab sebagai calon pemimpin”²⁷.

Jika dibandingkan antara cara mendidik Ahmad Hassan dan Agus Salim, tampak ada persamaan tujuan walaupun caranya berbeda. Tujuan yang sama itu adalah “keberanian mengambil keputusan, percaya diri, keberanian menanggung resiko, dan penanaman rasa tanggung jawab.” Semua itu terpatri dalam jiwa Natsir dan teraplikasi dalam kehidupannya, termasuk dalam aktivitas politiknya. Dengan Agus Salim, Natsir muda bukan hanya bertemu muka, tetapi juga bertemu wawasan, gagasan dan kesamaan sudut pandang dalam hal pemikiran dan pergerakan perjuangannya²⁸. Kalau Hasan menjadi tempat bertanya bagi Natsir dalam masalah keagamaan, maka Agus Salim bagi Natsir dan kawan-kawan di JIB menjadi tempat berkomunikasi seputar permasalahan politik dan pergerakan perjuangan²⁹. Di kalangan JIB, Agus Salim mendapat panggilan akrab *Oude Heer* (orang tua kita) dan *Paatje* (ayah) sebagai penghormatan kepadanya. Sedangkan Mohammad Roem menyebutnya sebagai “Bapak Spiritualisme Cendekiawan Muslim”³⁰ seorang bapak yang mengawal spirit dan rohani generasi muda.

Tokoh-tokoh intelektual muslim seperti Natsir, Roem, Kasman Singodimedjo, Prawoto Mangkusasmito, Jusuf Wibisono, dan masih banyak yang lain adalah hasil “bentukan“ Agus Salim yang gemilang melalui JIB. Sehingga tak heran bila Syafi’i Ma’arif menyebutnya sebagai “Bapak Kaum Intelektual Muslim Modern Indonesia” atau “Tokoh Pembentukan Tradisi Kecendekiawanan Islam di Indonesia”³¹. Kemudian disebutkan kembali seperti Taufik Abdullah, Agus Salim telah mewariskan segala-galanya kepada mereka, yaitu berupa kejujuran, intelektualisme Islam, kepercayaan kepada diri sendiri, kecakapan mengurus negara, kesederhanaan, kesetiaan kepada prinsip dan perjuangan, serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap nasib bangsa dan negara. Ketokohan Agus Salim sangat diakui dari berbagai kalangan yang mengetahuinya. Seperti

²⁷ M. Syafi’i Anwar, “Pemimpin Harus Berakhlaq Mulia, Berakar di Hati Rakyat,” *Panji Masyarakat* (Jakarta Indonesia, 1987).

²⁸ Abdurrahman Masykur 1993

²⁹ Ridwan Saidi, *Islam dan Nasionalisme Indonesia* (Jakarta Indonesia: LSIP, 1995).

³⁰ Ridwan Saidi, *Zamrud Khatulistiwa* (Jakarta Indonesia: LSIP, 1995).

³¹ M. Syafi’i Ma’arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1993).

pengakuan dunia akan Agus Salim *The Grand Old Man of Indonesia*³², yang ia geluti sebagai orang yang pandai dalam hal diplomatik.

Keberpengaruhannya Agus Salim atas pemikiran Natsir seperti yang dikatakan Ridwan Saidi ialah menyoal permasalahan khilafiyah³³. Terlihat dari berbagai karyanya, Natsir berupaya untuk tidak menonjolkan pembahasan terkait dengan perbedaan atau Ikhtilaf di kalangan umat. Upaya untuk mengajak kepada sebuah persatuan persepsi dan gerakan perjuangan. Seperti Ali Yafie menyatakan bahwasanya “pemikiran natsir terkait Islam sangat moderat dan universal”³⁴. Maka terdapat sebuah kewajaran dalam genologi keilmuan dan pemahaman yang ada dalam diri Natsir dengan julukan *The Second Grand Oldman* setelah Haji Agus Salim³⁵. Nada ini selaras dengan ungkapan sebenarnya Natsir pun sebenarnya dapat melampaui kemampuan yang dimiliki oleh gurunya.

c. Syekh Ahmad Syurkati dan H. O. S. Tjokroaminoto

Bukan tanpa sebab dan prolog perjumpaan antara Natsir yang mengenal Ahmad Syurkati dan H.O.S. Tjokroaminoto pada 1877-1943. Hal tersebut dikarenakan keduanya adalah sahabat karib A. Hassan di dalam bertukar pikiran. Upaya-upaya ini pun tak luput dari kecemerlangan Natsir untuk bisa mendapatkan ilmu dari keduanya sebagai tempat bertanya. Menurut Dr. Jalaluddin, pengaruh Syurkati terhadap diri Natsir adalah “pembaharuan pemahaman dan pemikiran ajaran-ajaran Islam”³⁶. Hal ini pun sangat nampak, dikarenakan Syurkati banyak mengungkapkan berbagai argumentasinya dalam hal ide-ide dalam sebuah pembaharuan dan pendalaman pemahaman Islam. Pergerakan organisasinya pun sangat familiar dengan pola dan gerakan nasionalisme kaula muda yang ada pada masanya seperti yang ia dirikan (Al-Irsyad). Maka dari inilah Nurcholish Madjid

³² Harry J Benda, *The Cresecent and the Rising Sun: Indonesia Islam Under Japanese Occupation 1942-1945* (Belanda: W. Van Hoeve, n.d.).

³³ Ridwan Saidi, *Zamrud Khatulistiwa*.

³⁴ Abu Rauzan, “Korban Penulisan Sejarah.”

³⁵ Siddiq Fadzil di dalam Lukman Hakiem 1993

³⁶ Daliar Noer, *The Modernist moslem movement in Indonesia 1900-1942* (Jakarta Indonesia: LP3ES, 1991).

merangkup beberapa gerakan pembaharu dalam dunia Islam seperti al-Irsyad, Persis dan Muhamaddiyah³⁷.

Menyoal dengan H.O.S. Tjokroamonoto, dalam analisa penulis sangat kental dengan memberikan bahwa ia mewarnai gerakan politik yang digagas oleh Natsir³⁸. Berbagai pemikiran yang progresif Tjokroaminoto memberikan karakteristik tersendiri dari pepaduan yang dilakukan oleh Natsir.

Ahmad Hassan pernah berperan dalam menanamkan ruh Islam dan pemahaman keagamaan yang radikal pada diri Natsir. Lalu diwarnai oleh Ahmad Syurkati dengan pembaharuan dalam pemahaman dan pemikiran ajaran-ajaran Islam. Kemudian dilengkapi oleh Haji Agus Salim dengan sikap yang moderat untuk mempersatukan umat bersama dengan apa yang telah disilsilahkan oleh HOS Tjokroaminoto. Semuanya bersatu pada diri dan jiwa Natsir sehingga membentuk pemikiran dan karakter keperibadiannya sebagai seorang “Pemimpin umat yang tegas dan konsisten dalam pemikiran dan tindakan yang inovatif serta bersikap moderat”.

2. Tranformasi Pemikiran Mohammad Natsir

Berkaitan dengan model dan pola pemikiran, Mohammad Natsir mengikuti pendapat Ibn Khaldun bahwa diantara kedua sisi antara agama dan negara sama halnya mengisyaratkan hubungan antara benda dengan bentuknya. Di dalam pendapatnya, sebuah negara diwajibkan memiliki akar pemikiran dan ideologi yang tertanam dan paten pada kehidupan masyarakat³⁹. Konsepsi yang sedemikian tersebut, Natsir menyadari betul bahwasanya, apa yang difikirkan dan apa yang direnungkan adalah tentang mempelajari sebenarnya hakikat diri kita sendiri atau *mead*⁴⁰.

Pada landasan inilah sebenarnya, ketika sebuah negara akan membangun dan mendirikan kesatuan maka segala lini baik negara sebagai perangkat pemersatu dan masyarakat sebagai rakyat yang akan dipersatukan harus bersama-sama mendemonstrasikan tujuan

³⁷ Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1993).

³⁸ Abu Rauzan, “Korban Penulisan Sejarah.”

³⁹ M. Natsir, *Capita Selecta-II* (Bandung: Yayasan Bulan Bintang Abadi, 1954).

⁴⁰ Noormawati dan Iswati 2019, h. 212

tersebut. Regulasi ataupun undang-undang yang dirumuskan, wajib untuk mewadahi segala macam unsur yang terkandung di dalamnya. Erat melekat hubungan antara negara dengan masyarakat akan menjadikan dan membangun sebuah peradaban yang kokoh. Begitulah sama halnya sebuah dakwah ataupun komunikasi religius dari sebuah pergerakan negara⁴¹.

Dengan anggapan dan narasi inilah Natsir mengajak masyarakat untuk dapat melihat Islam yang kedudukannya sebagai agama anutan mayoritas masyarakat Indonesia. Anggapan yang diangkat Natsir ini ialah bahwasanya Islam mempunyai akar yang sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat. Maka atas uraian dasar inilah Natsir mempunyai pijakan kuat untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara meskipun secara bahasa bukanlah sebagai negara Islam, akan tetapi pergerakan dan perjalanan negara kita ini berasaskan nilai-nilai Islam. Alasan tersebut didukung dengan partai-partai Islam yang sepakat dengan asas-asas nilai Islam sebagai dasar Negara. Anggapan ini semakin kuat dan kokoh, karena ajaran Islam mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara, masyarakat dan dapat menjamin keragaman hidup antar berbagai golongan sebagai negara dengan heterogenitasnya toleransi⁴².

Mengupas masalah hubungan Islam dan negara, Natsir mendasarkan uraiannya kepada ayat Al-Qur'an: "*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*"(Q.S. Ad-Dzariyaat [51] Ayat: 56). Dari ayat tersebut, Natsir berupaya menjeneralisir teorinya dengan menguatkan bahwasanya orang Islam hidup di atas dunia ini dengan cita-cita kehidupan menjadi hamba Allah yang sempurna iman, Islam dan ihsannya mencapai kejayaan dunia dan akhirat.

Pandangan Natsir menangani urusan sosio-politik ummat, diantara mengenai prinsip. Dan Natsir memandang penting terkait hal tersebut yang harus diikuti dan dihormati mengenai sebuah nilai prinsip *syura*'. Tentang bagaimana mengembangkan dan menyesuaikan mekanisme *syura*'. Semuanya tergantung pada ijtihad ummat Islam, karena Islam tidak menetapkan secara kaku dan pasti. Kajian teori ini adalah tentang sintesa antara demokrasi dan otokrasi atau sistem politik *dictatorial* yang berasal dari interpretasi yang dianggap kurang tepat terkait dengan sebuah konsep kedaulatan politik suatu negara. Mohammad Natsir adalah demokrasi sejati karena

⁴¹ Nasor et al. 2022, h. 140

⁴² M. Natsir, *Capita Selecta-II*.

Natsir sependapat dengan Abul A'la Maududi dalam hal konsep kedaulatan Tuhan (*The Sovereignty of God*)⁴³.

3. Konstruksi Pemikiran Natsir

Terukir Natsir yang memberikan pidato pada sebuah agenda Pakistan Institute of World Affairs pada 02-April-1952 di Karachi⁴⁴: *What and how can the Muslims contribute to the attainment of a stable World peace*. Dalam pidatonya tersebut antara lain dia mengatakan bahwa:-- "*Pakistan is decidedly an Islamic country by population and by choice as it has declared Islam as the state's religion. Sois Indonesia an Islamic country by the fact that Islam is recognised as the religion of Indonesian people, though no expressed mention is made in one constitution to make it the state's religion. But neither has Indonesia excluded religion from statehood. In fact it has put the monotheistic creed in the one and only God at the head of the Pancasila--the five principles- adopted as the spiritual, moral and ethical foundation of the state and the nation. Trus for both our countries and peoples Islam has its very essential place in our lives, which does not mean, however, that our state- organization is theocratic*".

Penyandingan butir-butir dalam Pancasila dengan al-Qur'an seperti pada Majalah Hikmah pada tahun 1954, dalam retorikanya Natsir mengungkap sebuah pertanyaan⁴⁵;--*bagaimana mungkin Qur'an yang memancarkan Tauhid, dapat bertentangan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa? Yang ajaran-ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan ijtimai'iyah bisa apriori bertentangan dengan keadilan Sosial? Yang justru memberantas sistem feodal dan pemerintahan istibdad (diktatur) sewenang-wenang, serta meletakkan dasar masyarakat dalam susunan pemerintahan, dapat apriori bertentangan dengan apa yang dinamakan kedaulatan rakyat? Yang menegakkan istilah islahu bainan nas (damai antara manusia) dapat apriori bertentangan dengan apa yang disebut peri-kemanusiaan? Yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan, apriori dapat dikatakan bertentangan dengan kebangsaan?*.

⁴³ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara* (Bandung: Segarsy, 2014).

⁴⁴ H. Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta Indonesia: UI Press, 1990).

⁴⁵ Daliar Noer, *The Modernist Moslem Movement in Indonesia 1900-1942*.

Bahkan ditegaskan kembali oleh Natsir terkait dengan konsepsi mempertentangkan Islam dengan Pancasila, dan Natsir berargumen dengan kalimat⁴⁶:

---“*Dimata seorang Muslim, perumusan pancasila bukan kelihatan sebagai satu barang asing yang berlawanan dengan ajaran Al-Qur’an ia melihat didalamnya satu pencerminan dari sebagian yang ada pada sisinya. Tetapi itu tidak berarti bahwa pancasila itu sudah identik atau meliputi semua ajaran Islam*”.

Berdasarkan sebuah referensi yang dirujuk dari pidato Presiden Soekarno pada 17-Juni-1954, Natsir di dalam sidang majelis konstituante mengemukakan bahwasanya penolakan akan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dapat dilihat dalam rapat gerakan pembela pancasila⁴⁷:--“*Ketuhanan (ketuhanan disini saya pakai di dalam arti religieusteit), itu memang sudah hidup didalam kalbunya bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh, beratus-ratus dan beribu-ribu tahun lamanya. Aku menggali di dalam bumunya rakyat Indonesia, dan pertama-tama hal yang aku liahta adalah religiusiteit. Apa sebab? Ialah karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang hidup diatas tarafnya agraria, taraf pertanian. Semua bangsa yang masih hidup diatas taraf agraria, tentu religius (saya belum memakai perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa) tetapi baru saja memakai perkataan religiusiteit, atau kepercayaan kepada sesuatu hal yang gaib yang menguasai hidup kita semua. Perasaan atau kepercayaan yang demikian itu hidup dalam kalbunya bangsa-bangsa yang masih hidup didalam taraf agrarian.*

Pada bagian lain Soekarno berkata⁴⁸;

--“*demikian juga dengan bangsa yang sudah meninggalkan taraf agraria dan sudah masuk taraf industrilisme, banyak yang meninggalkan religiusiteit, oleh karena ia sudah hidup dalam alam kepastian. Malah didalam taraf inilah timbul aliran-aliran yang tidak mengakui adanya Tuhan. Didalam taraf inilah timbul apa yang dinamakan atheisme. Tetapi jikalau saudara-saudara bertanya kepada Bung Karno secara personal: Apakah Bung Karno percaya kepada Tuhan? Bung Karno berkata “Ya aku percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bukan dua, bukan tiga. Tuhan yang satu. Tuhan yang menguasai segala hidup. Ciptaan manusia yang*

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*.

⁴⁸ Ibid.

berubah-ubah. Pikiran manusia yang berubah-ubah....Seperti orang di dalam dunia industrialisme mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Padahal Tuhan ada, tetapi ciptaan manusia berganti-ganti.

Demikianlah dari kutipan panjang pidato Presiden Soekarno itu jelas tergambar kemana Pancasila hendak dibawa dan bahaya apa yang bakal terjadi jika hal itu dibiarkan, sebab jelas sekali dari pidato Soekarno itu, bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila tidak lebih dari ciptaan manusia, lebih jauh Tuhanpun akan bergantung kepada manusia. Dia bisa ada, bisa tidak ada. Tuhan tergantung kepada perkembangan masyarakat manusia. Jadi tampak jelas bahwa yang ditolak Mohammad Natsir tersebut bukanlah Pancasila, melainkan Pancasila yang ditafsirkan dan hendak diberi jiwa sekuler (*la diniyah*). Tentang ini Mohammad Natsir berkata⁴⁹;

--"bagi seorang sekuler, soal Ketuhanan, sampai kepada soal Ketuhanan yang Maha Esa tak ada hubungannya dengan wahyu: baginya soal Ketuhanan adalah soal ciptaan manusia yang berganti-ganti.

Mohammad Natsir kemudian mengemukakan bahaya sekularisme⁵⁰: *".....bila ada pengikut Islam yang menjadi chauvinist, seorang yang ta'assub bangsa atau agama dan melanggar perikemanusiaan, maka itu terang-terang melanggar ketentuan Islam yang nyata-nyata. Tetapi rasialisme Hitler yang melanggar perikemanusiaan tidak dapat dinamakan sesuatu excess sikap hidup sekularisme sebab dalam paham sekularisme itu, sama sekali tidak ada ketentuan-ketentuan batas yang nyata untuk membendung rasialisme ala Hitler itu.*

Sesudah menjelaskan arti negara dengan mengemukakan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, Natsir berpendapat bahwa: *"...Dasar negara pun harus sesuatu faham yang hidup, yang dijalankan sehari-hari, yang terang dan dapat dimengerti, pendek kata yang menyusun hidup sehari-hari rakyat perseorangan maupun kolektif"*⁵¹.

Bagi Mohammad Natsir, dasar negara yang tidak memenuhi syarat yang demikian itu, tentulah menempatkan negara terombang-ambing, labiel dan tidak duduk atas sendi-sendi yang kokoh. Ia masih melanjutkan: *"Tiap-tiap Ideologi ...bukan hanya rangkaian pikiran atau ide-ide, tetapi ia juga merupakan suatu perpaduan antara idee*

⁴⁹ Mohammad Natsir 2014, h. 44

⁵⁰ Mohammad Natsir 2014, h. 86

⁵¹ Mohammad Natsir 2014, h. 24

dan aliran perasaan dengan gelombang-gelombang tertentu”⁵².

Berbagai bentuk penafsiran yang muncul atas kalimat sekuler tersebut, kemudian Natsir mengambil sikap⁵³: --“terlepas dari soal tempatnya dalam urutan, perumusan kelima sila itu entah dibawah entah diatas, yang sudah terang ialah bahwa ia tidak dianggap sebagai sumber dari empat sila-sila yang lain”.

Bagi Natsir, bagaikan bercermin dalam ucapan bahwanya; --*“Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, haruslah menjadi “point of reference” bagi keempat sila lainnya, bukan sekadar “rasa adanya Tuhan, sebagai ciptaan manusia yang relatif, yang berganti ganti”*”.

Secara seksama jikalau dinilai ialah bahwasanya Natsir tidak memiliki konsistensi dalam pernyataan yang diungkapkannya. Satu sisi di dalam sidang majelis Konstituente tahun 1957 dan kedua dalam pidatonya di Karachi Pakistan pada tahun 1952. Bahwasanya ini sama sekali tidak ada indikasi yang kontradiktif dari dua pernyataan dan sikap yang dicerminkan oleh Natsir terhadap Pancasila. Penekana yang digambarkan olehnya ialah, sebagai orang yang beriman akan keTuhanan, Natsir takut jikalau filosofi pancasila ini hanya sebagai netralitas agama di Republik Indonesia. Dikarenakan, bagi Natsir jika pancasila ini ingin tetap dijadikan sebuah *Pure Concept*, ia tidaklah merupakan satu realiteit di dalam alam positif. Dalam retorik lainnya Natsir berkata *“inilah satu tragic yang dihadapi oleh Pancasila yang sekuler (la diniyah) dan netral”*. Lebih lanjut ia menyimpulkan *“Dari ideologi Islam ke Pancasila bagi umat Islam adalah ibarat melompat dari bumi tempat berpijak ke ruang hampa, vacuum tak berhawa”*⁵⁴.

4. Peranan Islam dalam Konstituente

Sebuah sejarah mencatat betapa para perjuangan dan pejuang sebagai pemimpin Islam Indonesia dari semua golongan menjelang proklamasi berusaha keras dan gigih di dalam mempertahankan pelaksanaan syariat yang terakui secara legal konstitusional. Hal ini jua dinilai sebagai bentuk perjuangan dakwah Islam di dalam upayanya membumikan Islam. Dai dan para juru dakwah selalu bersemangat dalam menghantarkan umat kepada jalan kesalihan, baik salih dalam individu dan sosial walaupun dengan tantangan yang berat⁵⁵. Sebuah kesepakatan yang tertuang dalam Piagam Jakarta

⁵² Mohammad Natsir 2014, h. 30

⁵³ Mohammad Natsir 2014, h. 53

⁵⁴ Mohammad Natsir 2014, h. 50

⁵⁵ Helman Elhany 2019, h. 317

tertanggal 22-Juni-1945 antara tokoh agamis dengan nasionalis.⁵⁶ Akan tetapi piagam ini hanya berumur selama 57 hari. Sesuai dengan konsideran tersebut tergantikan dengan sila pertama dalam pancasila dengan narasi awal “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi: *Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Dalam sebuah kutipan H. Endang Saifudin Anshari dari Yamin tentang Naskah persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang padanya presiden Soekarno menjanjikan kepada umat Islam menjadikan UUD 1945 bersifat sementara⁵⁷: --“Nanti....kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna”.

Konsepsi yang serupa ketika presiden Soekarno menjanjikan pengusulan prinsip permusyawaratan pada 18 Agustus 1945 dan 1 Juni 1945 sebagai salah satu sila dasar negara⁵⁸:

--“Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan dan permusyawaratan di dalam badan Perwakilan Rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan, Badan Perwakilan, Inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam”.

Pengagetan yang cukup membuat kalangan bereaksi ialah ketika Soekarno dalam pidatonya di Amuntai Kalimantan Selatan pada tanggal 27-Januari-1953 dia berkata⁵⁹:

⁵⁶ S Sugianto dan R Hidayat, “Moderasi Beragama Sebagai Jalan Dakwah Mayoritas Muslim Pada Minoritas Non Muslim,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan ...* 3, no. 1 (2021): 23–41, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/JBPI/article/view/3270>.

⁵⁷ Endang Saifuddin Anshari 1997, h. 66

⁵⁸ Soekarno 2001, h. 23

⁵⁹ Endang Saifuddin Anshari 1997, h. 67

--“Negara yang kita susun dan yang kita ingini ialah negara nasional yang melliputi seluruh Indonesia. Kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, maka banyak daerah-daerah yang penduduk-penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri, misalnya maluku, Bali, Flores, Timor, Kai dan juga Irian barat yang belum masuk wilayah Indonesia tidak akan mau ikut dalam Republik”.

Tentu saja pidato ini menuai banyak protes dari kalangan Islam, seperti Gerakan Pemuda Islam Indonesia yang dikutip dari majalah Aliran Islam menyatakan: *“kini bapak sudah menanam benih-benih separatisme kepada rakyat dan ternyata dengan itu bapak telah menyatakan memihak kepada segolongan rakyat yang tidak setuju dengan ideologi Islam”*⁶⁰.

Bersamaan dengan hal tersebut, Sukiman beserta Natsir berupaya untuk memperkecil permasalahan tersebut dengan meyakinkan rakyat bahwasanya hal ini adalah imbas dari persilangan pendapat kacaunya sebuah istilah. Yang sesungguhnya point inipun adanya di internal Muslim sendiri, maka tidaklah untuk di besar-besarkan dan dibawa keluar secara berlebihan⁶¹. Hal serupapun diupayakan untuk memperjelas keburaman pemikiran yang kontras tersebut. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh A. Dahlan Ranuwiharjo, ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam melalui diskusinya dengan melayangkan surat kepada Soekarno terkait penjelasan sebuah korelasi antara negara nasional dan negara Islam serta antara ideologi Islam dengan ideologi Pancasila⁶².

Imbuan atas jawaban tersebut yang kemudian pada saat Soekarno memberikan kuliah umum terkait dengan “Negara Nasional dan cita-cita Islam”, 7-Mei-1953 di Universitas Indonesia, Soekarno mengakhiri kuliahnya dengan ungkapan: *---“Tentang kedudukan Pancasila dan Islam, aku tidak bisa mengatakan lebih dari pada lain dengan mensitir ucapan saudara pemimpin besar Masyumi, Mohammad Natsir di Pakistan Karachi tatkala beliau mengadakan ceramah di hadapan Pakistan Institute for International Relation, beliau mengatakan bahwa Pancasila dan Islam tidak bertentangan satu sama lain”.*

Sementara itu pergulatan persoalan-persoalan negara yang semakin harus dijelaskan secara gamblang dalam pembentukan dan

⁶⁰ Endang Saifuddin Anshari 1997, h. 69

⁶¹ Endang Saifuddin Anshari 1997, h. 70

⁶² Soekarno 2003, h. 3

pelegalan kepemimpinan sebuah institusi negara. Dalam kaitanya, Nasution memaparkan jikalau keseimbangan antara berbagai unsur perdebatan yang tidaklah dijalankan dengan perimbangan akan berakibat terhadap stabilitas negara, yang dapat dipastikan akan mengalami kegagalan⁶³. Maka barulah pada kabinet Burhanuddin (Mayumi) terselenggaranya pemilihan umum 15 Desember 1955 serta setelahnya dilantik oleh Soekarno tanggal 10 November 1956.

Pergolakan dan perdebatan yang amat mendasar ialah menyoal ideologi negara. Yang dalam sidang konstituente sampai berlangsung dua babak, pada tanggal 11 November sampai dengan 7 Desember 1957. Tiga usulan yang diajukan dalam sidang tersebut, *Pertama* adalah tentang pancasila dengan dasar rumusan a) Ketuhanan, b) Prikemanusiaan, c) Kesatuan atau Nasionalisme, d) Permusyawaratan atau Demokrasi dan e) Keadilan Sosial. *Kedua*, ialah menyoal Islam terkait dengan ajaran mengenai prihal duniawi dan ukhrowi yang secara akumulasi 90% Muslim dianut oleh masyarakat Indonesia. *Ketiga*, terkait dengan permasalahan sosial-ekonomi. Berkenaan dengan struktur sosial-ekonomi berdasar asas kekeluargaan seperti dalam pasal 33 UUD 1945. Yang dimana secara pelaksanaan dijamin oleh struktur politik (Pasal 1 UUD)⁶⁴.

Spesifikasi uraian dukungan atas tiga rumusan dalam sidang majelis konstituente ialah;

- a) Usulan pertama yang menyoal permasalahan pancasila didukung dan disetujui oleh kurang lebihnya dalam suara sebanyak 273 wakil. Meliputi 116 dari Partai Nasional Indonesia (PNI), 60 suara Partai Komunis Indonesia, 20 anggota dari Republik Proklamasi, Perkindo dengan 16 anggota, 10 suara Partai Katolik dan ditambah oleh partai-partai kecil Partai Sosialis Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia.
- b) Terkait dengan usulah kedua terkait dengan Islam, yang ketat mendukung konsepsi tersebut ialah seperti Masyumi dengan 112 suara, 81 anggota dengan Nahdatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia dalam 16 suara, Partai atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah pada 7 suara serta ditambah dengan 4 dukunga lainnya.
- c) Usulan ketiga mengenai sosio-ekonomi hanya ada 9 anggota suara yang mendukungnya. Dari partai buruh ditambah

⁶³ Adnan Buyung Nasution 1995, h. 32

⁶⁴ Adnan Buyung Nasution 1995, h. 49

dengan partai Murba⁶⁵.

Terlebih lagi dalam pandangan lainnya terkait dengan pemahaman dasar negara dan Pancasila. Seperti yang dikutip Roeslan Abdulghani⁶⁶ menyatakan; *“pokok utama dari sila yang lima itu adalah sila kebangsaan yang berasal dari reaksi terhadap kolonialisme”*. Maka dengan uraian tersebut, Mohammad Natsir berkata: --*“Kalaulah kita mendengar penjelasan tentang Pancasila saudara Roeslan Abdulgani dimana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sila-sila yang lima itu berpusat kepada sila kebangsaan dan bahwa kebangsaan kita ini bersumber kepada reaksi terhadap kolonialisme, yakni suatu tafsiran dari Pancasila yang sekuler”*.

Dilain sisi Arnold Manomutu⁶⁷, yang juga anggota PNI beragama Kristen dalam pidatonya dalam sidang Konstituante menekankan sila pertama dari sudut pandangan kristen yang dihubungkan dengan ayat-ayat dari kitab suci Injil. Menurutnya *“Ketuhanan Yang Maha Esa bagi kami adalah pokok dan sumber dari sila-sila yang lain. Tanpa Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila akan menjadi satu filsafat materialistis belaka”*.

Tafsir tersebut mendapatkan sambutan hangat oleh Natsir⁶⁸ dengan mengungkapkan bahwa: --*“Bukanlah ini berarti bahwa kita sudah sampai pada satu titik pertemuan, antara umat Kristen dan umat Islam, yakni sama-sama hendak mencari dasar negara yang bersumber pada wahyu ilahi ? Baik yang melalui injil ataupun melalui Al-Qur’an. Dengan demikian akan terdapat kiranya kenyataan bahwa baik golongan saudara Manomutu dan golongan kami mendapat persesuaian dalam satu essential, yakni sama-sama menolak faham sekularisme sebagai falsafah negara. Jadi pilihan selanjutnya tidak lagi antara faham sekularisme (la-diniyah) atau faham agama, akan tetapi antara wahyu ilahi yang diterima oleh umat Islam atau wahyu ilahi yang diterima oleh umat Kristen”*.

Terkait dengan sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang disampaikan oleh Soekarno dalam sambutannya di depan Gerakan Pembela Pancasila mendapatkan kritik yang serius dari Natsir saat sidang Majelis Konstituante 12 November 1957, yang

⁶⁵ Adnan Buyung Nasution 1995, h. 33

⁶⁶ Mohammad Natsir 2014, h. 100

⁶⁷ Mohammad Natsir 2014, h. 101

⁶⁸ Mohammad Natsir 2014, h. 103

menurutnya⁶⁹: *“Paham tentang wujud Ketuhanan telah direlatifkan menurut perkembangan hidup masyarakat dari satu taraf ke taraf yang lain. Dari taraf hidup pengembara ke taraf agraria sampai ke taraf industrialisasi dan lain-lain “Kesimpulan dari pada paham itu dalam bentuk paling simple ialah: seorang yang masih dalam taraf kehidupan agraris memerlukan Tuhan, tetapi kalau sudah menjadi industrialis, Tuhan tidak diperlukan lagi”.*

Kemudian terkait dengan pertanyaan Natsir yang mengungkapkan dimanakah gerangan, hendaknya wahyu ditempatkan sebagai sumber kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan?: --*“wahyu yang bebas dari pengaruh-pengaruh yang bersifat temporer seperti pengaruh agraria, nomadis atau industrialisasi”.* Dilanjutkan kembali olehnya: --*“Bagi seorang sekularis soal Ketuhanan, sampai pada soal Ketuhanan Yang Maha Esa, tak ada hubungannya dengan wahyu; baginya soal Ketuhanan adalah ciptaan manusia yang berganti-ganti.”* Yang dilanjutkan dengan menyatakan *“paham tersebut sebenarnya dipelopori oleh kaum marxis, yang mengatakan bahwa struktur ekonomi dan masyarakat itulah yang menentukan paham hidup suatu masyarakat tentang agama, filsafat atau maupun kultur”⁷⁰.*

Pada dasarnya Natsir tidaklah menolak dan tetap mengakui kebaikan Pancasila, namun yang ia tegaskan ialah terkait dengan banyaknya macam penafsiran beragam sehingga atas dasar ini ia menolaknya dengan tegas⁷¹: --*“Memang tidak bisa-bisa disangkal; bahwa dalam pancasila itu terumus idee-idee yang baik. Tetapi keterangan-keterangan yang kita dapat dari penyokong Pancasila itu sendiri, menunjukkan bahwa mereka itu sendiri tidak dapat menentukan apa isinya yang sebenarnya, apa urutannya (volgerdenya), apa asalnya, apa intinya (nucleusnya) dan apa hubungannya satu sama lain. Karena tidak jelas, maka kesulitan-kesulitan akan berkembang. Oleh karena asas negara kita itu harus jelas dan tegas, maka sulitlah bagi kami untuk menerima sesuatu yang tidak tegas”.*

Bagi Natsir, pancasila yang dipandang sebagai falsafah negara dan kemudian banyak penafsiran yang berbeda dari para pendukungnya. Hal inilah yang akhirnya membuat pemaknaan pancasila menjadi kabur dan tidak berkata apa-apa kepada jiwa umat

⁶⁹ Mohammad Natsir 2014, h. 103

⁷⁰ Mohammad Natsir 2014, h. 44

⁷¹ Mohammad Natsir 2014, h. 56

Islam. Yang dimana sebenarnya dalam kehidupan umat Islam berpandangan hidup serba terang, lengkap dan tegas. Hal tersebut termaknai seharusnya pancasila dapat menerangkan dan meluruskan dengan komitmen bahwasanya dihati rakyat Indonesia menjadi sebuah nilai yang sakral dan fundamental. Hal yang demikian juga terpancar di dalam keyakinan Islam. Sehingga atas dasar ini Natsir menyuarakan kepada para pendukung Pancasila dengan himbauan⁷²;

“Saya ingin menyampaikan seruan yang sungguh-sungguh kepada saudara-saudara pendukung Pancasila. Sila yang saudara maksud ada terdapat dalam Islam. Bukan sebagai “pure concept” yang steril, tetapi sebagai nilai-nilai hidup yang mempunyai substansi yang riil dan terang. Dengan menerima Islam sebagai falsafah negara, saudara-saudara pendukung pancasila sedikitpun tidak dirugikan apa-apa. Baik sebagai pendukung Pancasila maupun sebagai orang yang beragama. Malah akan memperoleh satu state philosophy yang hidup berjiwa, berisi tegas dan mengandung kekuatan. Tidak satupun dari lima sila yang terumus dalam pancasila itu yang akan terluput atau gugur, apabila saudara-saudara menerima Islam sebagai Dasar negara. Dalam Islam terdapat kaedah-kaedah yang pasti, dimana “pure concepts” dari sila yang lima itu mendapat substansi yang riil mendapat jiwa dan roh penggerak. Kepada saudara-saudara yang mengajukan sosial ekonomi sebagai dasar negara, saya berseru, dalam Islam saudara-saudara pasti akan bertemu dengan konsep Sosial ekonomi yang progresif”.

Tiga usul yang berkaitan dengan dasar negara seperti Islam, Pancasila dan Sosial Ekonomi sebagai dasar dalam meletakkan ideologi negara sebagaimana yang diperjuangkan oleh masing-masing pendukungnya sejak 11 November hingga 7 Desember 1957 tetaplah mendekati garis yang saling berjauhan. Hingga akhirnya, sebagai upaya perseptif dalam meleraikan perdebatan tersebut maka dilaksanakanlah sidang pleno untuk membahas laporan panitia perumus terkait dengan dasar negara yang dihelat pada 6 Desember 1957⁷³. Maka dari risalah perundingan jilid VI tersebut lahirlah kesimpulan sebanyak empat point, diantaranya; i) Masih ada tiga pandangan yang berbeda mengenai dasar Negara, ii) Kelima butir konsensus yang diperlukan sebagai prasyarat bagi dasar negara

⁷² M. Natsir 1954, h. 58

⁷³ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Kasus Sosial-Legal atas Konstituente 1956-1959*.

mendapat dukungan umum tetapi tidak berhasil menjembatani perbedaan di antara ketiga pandangan tersebut, iii) Sejumlah pembicara menawarkan usul-usul untuk mencapai kompromi, iv) Panitia persiapan konstitusi harus ditugaskan untuk menyusun rumusan yang lebih progresif bagi dasar negara atas dasar hasil-hasil sidang pleno ketiga tahun 1957 untuk diajukan dalam sidang lanjutan pleno berikutnya⁷⁴.

Berbagai upaya dilakukan dalam jalan meleraikan perbedaan dan perdebatan untuk dijadikan satu mufakat bagi keberlanjutan negara sebagai agenda penetapan dasar negara. Akan tetapi sampai akhir 2 Juni 1959 pun masih belum menemukan titik temu di dalam sidang majelis Konstituente dalam penetapan dasar negara tersebut. Sehingga sebagai langkah puncaknya ialah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan dibubarkannya konstituente dan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dengan mengalahkan Islam dan Sosio-Ekonomi.

Denagn akhir dan terbitnya Dekrit tersebut agaknya semakin sarat akan makna di dalam membesar-besarkan isu atas kegagalan konstituente dalam merumuskan dasar negara dan UUD. A. Kahar Muzakki (Masyumi) pada 11 Mei 1959 menyampaikan di depan sidang majelis Konstituente, bahwa⁷⁵; --*“saya mempunyai pengalaman pada biasanya bahwa ketua konstituente kita Mr. Wilopo itu adalah seorang yang benar dalam perasaannya. Pada hari penutupan Panitia Persiapan Konstitusi (tanggal 18 Februari 1959) yang lalu, saya perhatikan dari kata-kata penutupan sidang Panitia Persiapan Konstitusi hari itu, dengan jelas beliau bahwa konstituente sudah dapat menyelesaikan 90% dari tugasnya.*

Berdasar dari berbagai uraian anggota konstituente tersebut, jelaslah apa yang mendasari Soekarno hingga sampai membubarkan konstituente. Hal tersebut dikarenakan tidak ada hasil apapun dan cenderung gagal, walaupun secara fakta hal ini jua tidak mendasar pada situasi murni di dalam tubuh majelis konstituente. Bilamana hal tersebut diberikan ruang yang cukup dengan tanpa adanya intervensi dari pemerintah, diprediksi majelis tersebut dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanahkan, yakni UUD RI dan dapat diterima bulat oleh segala lini kelompok masyarakat yang ada.

Bahkan pemurnian dan kelantangan suara yang dilantunkan oleh Natsir terkait dengan sekulerisasi negara dan pancasila

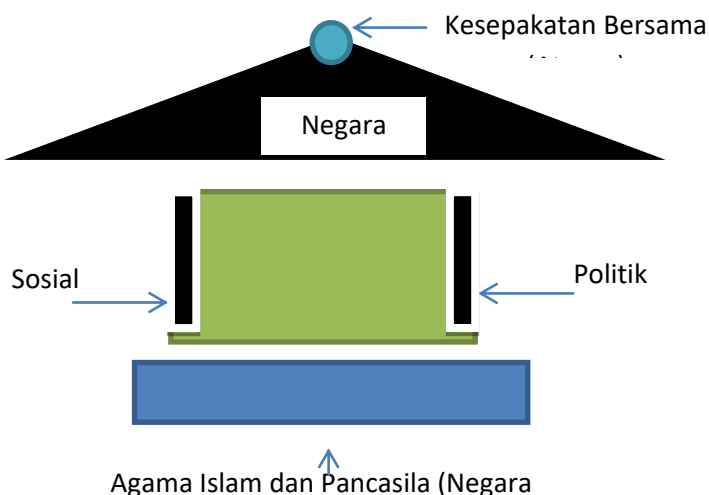
⁷⁴ Adnan Buyung Nasution 1995, h. 54

⁷⁵ Endang Saifuddin Anshari 1997, h. 88

mendapatkan penentangan yang keras darinya. Merekonstruksi struktural Pancasila menjadi Ekasila yakni dengan Gotong Royong. Dengan tanpa mencantumkan konsep Ketuhanan atau Tuhan Yang Maha Esa akan tetapi mereposisinya menjadi Kebebasan Beragama sebagaimana yang disuarakan oleh golongan Komunis.

Sebagai uraian dan gigihnya Natsir di dalam mengawal upaya-upaya untuk bersama-sama mengkonstruksi dasar dan ideologi negara. Serta jalannya tampak jelas dan lantang bahwasanya nilai-nilai Islam melekat dan ditransformasikan oleh Natsir bahwasanya, transformasi Islam moderatlah yang diusungnya untuk mencapai kesepakatan bersama dan kehidupan bersama di NKRI ini. Dapat kita lihat di dalam kerangka yang difikirkan sebagai gerakan dan perjuangan Natsir.

Bagan 1. Tranformasi Islam Moderat Mohammad Natsir



Dapat kita deskripsikan, bahwasanya Islam dan Pancasila adalah yang menjadi lokomotif dan motor mentalitas pondasi masyarakat Indonesia. Bernegara dengan dasar dan landasan tersebut direfleksikan dalam kehidupan sosial-politik. Maka, dialektika tersebut patut dimaknai dengan nama Negara Demokrasi Islam atau Negara yang Berdemokrasi berasaskan Islam.

C. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan di atas dapat diketahui konsep Islam moderat Moh Natsir tertransformasi pada konsep bernegaranya. Upaya di dalam membentuk dasar negara demokrasi yang berasaskan nilai-nilai Islam dan tetap berpegang teguh untuk mempertahankan keutuhan bersama dalam kesepakatan bersama. Dengan kegigihan Natsir di dalam menyuguhkan dan menawarkan konsepnya sebagaimana agama Islam menjadi pijakan dalam kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia. Walaupun pada akhirnya, tetaplah konsep-konsep pancasila ini mendeskripsikan dan merealisasikan bahwasanya Islam adalah sebagai dasar dan bentuk kebersamaan hidup bersama dalam wadah bernegara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak dicampuri bumbu-bumbu ataupun unsur-unsur sekulerisasi.

Daftar Pustaka

- A Syafiq Mughni. *Hasan Bandung: Pemikiran Islam Radikal*. Surabaya: Bina Ilmu, 1994.
- abdul qadir jawasBin, Yazid. *[Jihad] kedudukan jihad dalam syariat Islam*. Jakarta Indonesia: Pustaka Al-Ilmu, 2007.
onesearch.id/Record/IOS1.INLIS000000000267936#holdings.
- Abdullah Aly. “Studi Deskriptif Tentang Nilai-Nilai Multikultural Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam.” *Jurnal Ilmiah Pesantren* 1, no. 1 (2015): 9–24.
<http://jurnal.assalaam.or.id/index.php/dfg/article/view/25/17>.
- Abdullah, Anzar. “Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis.” *Addin* 10, no. 1 (2016): 1.
- Abdurrahman Masykur. “Berpolitik Untuk Tujua Luhur.” *Panji Masyarakat* 1. Jakarta Indonesia, 993.
- Abu Rauzan. “Korban Penulisan Sejarah.” *Suara Masjid*. -, Februari 1993.

- Adnan Buyung Nasution. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Kasus Sosial-Legal atas Konstituente 1956-1959*. Jakarta Indonesia: Gramedia, 1995.
- Afwadzi, Benny, Universitas Islam, Negeri Maulana, dan Malik Ibrahim. “Membangun Moderasi Beragama Dengan Parenting Wasathiyah Dan Pendahuluan.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 16, no. 2 (2020): 106–120.
- Azra, Azyumardi. “NU: Islam Tradisional dan Modernitas di Indonesia.” *Studia Islamika* 4, no. 4 (2014).
- Daliar Noer. *The Modernist moslem movement in Indonesia 1900-1942*. Jakarta Indonesia: LP3ES, 1991.
- Dawam Rahardjo. *Intelektual, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*. Bandung: MIZAN, 1993.
- Endang Saifuddin Anshari. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta Indonesia: Gramedia, 1997.
- H. Munawir Sadjali. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta Indonesia: UI Press, 1990.
- Harry J Benda. *The Cresecent and the Rising Sun: Indonesia Islam Under Japanese Occupation 1942-1945*. Belanda: W. Van Hoeve, n.d.
- Hemlan Elhany. “Dakwah Islam Di Era Globalisasi Perspektif Bimbingan Penyuluhan Islam Hemlan Elhany” 01, no. 02 (2019): 297–320.
- Hidayat, Rahmat. “Konsep Pendidikan Karakter Dalam Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Pemikiran Burhanuddin Al-Zarnuji).” *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019): 1.
- Iffan, Ahmad, dan M Ridho Nur. “Ahmad Iffan” 3, no. 2 (2020).

- Itmam, Muh. Shohibul. "Pemikiran Islam dalam Perspektif Sunni dan Syi'ah." *Penelitian* 7, no. 2 (2013): 1–18.
- Jalaluddin al-Suyuthi. *Husn al-Muhadharah*. Mesir: Dar Ihya Kutub al-Arabiyyah, 1967.
- Kartini Kartono. *pengantar metodologi research sosial*. Bandung: Alumni bandung UI, 1980.
- Lukman Hakiem. *Pemimpin Pulang; Rekaman Peristiwa Wafatnya M. Natsir*. Jakarta Indonesia: Yayasan Piranti Ilmu, 1993.
- M. Natsir. *Capita Selecta-II*. Bandung: yayasan bulan bintang abadi, 1954.
- M. Syafi'i Anwar. "Pemimpin Harus Berakhlaq Mulia, Berakar di Hati Rakyat." *Panji Masyarakat*. Jakarta Indonesia, 1987.
- M. Syafi'i Ma'arif. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1993.
- Marianne Jorgensen dan Louise Phillips. *Discourse Analysis as Theory and Method*. Los Angeles: Sage, 2002.
- mattulada. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*. Kota Makassar: Bhakti Baru, 1982.
http://ucs.sulselib.net//index.php?p=show_detail&id=59816.
- Memoar. *Senarai Kiprah Sejarah*. II. Jakarta Indonesia: Pustaka Utama Grafiti, 1993.
- Mohammad Natsir. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Bandung: Segi Arsy, 2014.
- Muhammad Lukman Fatahullah Rais. *Mohammad Natsir Pemandu Umat*. Jakarta Indonesia: Bulan Bintang, 1988.
- Muridan. "gagasan pemikiran dan gerakan dakwah m. natsir di indonesia." *komunika* 4, no. dakwah dan komunikasi (2010).

media.neliti.com/media/publications/148979-ID-gagasan-pemikiran-dan-gerakan-dakwah-m-n.pdf.

Nasor, Muhammad, Rendra Nasrul Rifai, Esen Pramudya Utama, Nina Ayu, dan Puspita Sari. "The International Journal of Social Sciences Teenagers ' Perception of Da ' wah in Constructing Good Morality" 10, no. 1 (2022).

Noeng Muhajir. *Metode penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin, 1996.

Noormawanti, Iswati. "KONSEP DIRI SEORANG DA'I." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 01, no. 02 (2019): 207–226.

Nurcholis Madjid. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1993.

Rahmat Hidayat. "fungsi masjid terhadap pengelolaan pengembangan masyarakat islam (pengembangan keumatan)." *Mau'idhoh Hasanah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2019): 33–43.

Ridwan Saidi. *Islam dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta Indonesia: LSIP, 1995.

———. *Zamrud Khatulistiwa*. Jakarta Indonesia: LSIP, 1995.

Saoki, Saoki. "Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2015): 344–367.

Soekarno. *Bung Karno; Negara Nasional dan Cita-Cita Islam (Seri Dokumenter)*. Jakarta Indonesia: Vision, 2003.

———. *Bung Karno Mengenai Pncasila*. Jakarta Indonesia: Gramedia, 2001.

Sugianto, S, dan R Hidayat. "Moderasi Beragama Sebagai Jalan Dakwah Mayoritas Muslim Pada Minoritas Non Muslim." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan ...* 3, no. 1 (2021): 23–41.

<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/JBPI/article/view/3270>.

Syafiq A Mughni. *Warisan A. Hassan dalam Arus Pemikiran di Indonesia*. Jakarta Indonesia: Media Dakwah, 1988.

Widodo, Wahyu. “Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kemampuan Kerja Pegawai (Studi di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur).” *Jurnal TAPIS* 11, no. 2 (2015): 134–142.

Yusuf Abdullah Puar. *Muhammad Natsir 70 Tahun; Kenang-Kenangan Kehidupannya dan Perjuangan*. Jakarta Indonesia: Pustaka Antara, 1978.